



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANIAMBAS

**Dinas
Komunikasi
Informatika
Dan
Statistik**

**Laporan Keuangan
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl Raja Haji fisabilliah – Pasir Peti (29791)
e-mail diskominfo@anambaskab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarempa, 23 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK,

JAPRIZAL S. Kom, MA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750120 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di awal tahun 2023 ini Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah - dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas secara tepat waktu. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1) Neraca, (2) Laporan Realisasi Anggaran dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan tanggapan, dukungan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders*. Selanjutnya, kami akan tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tarempa, 23 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK,

JAPRIZAL S. Kom, MA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750120 200312 1 008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN OPERASIONAL	3
3. NERACA	5
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I PENDAHULUAN	9
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	9
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	9
3. Komponen Laporan Keuangan	10
4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	11
B. BAB II KEBIJAKAN FISKAL / KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD	13
1. Kebijakan Fiskal / Keuangan	13
2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD – APBDP PD	16
C. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	19
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	19
2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan	19
D. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
1. Entitas Akuntansi/Entitas Keuangan SKPD	21
2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	21
3. Sistem Akuntansi SKPD	21
a. Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA SKPD	21
b. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD	21
c. Akuntansi Piutang SKPD	22
d. Akuntansi Persediaan SKPD	23
e. Akuntansi Aset SKPD	24
f. Akuntansi Kewajiban SKPD	24
g. Akuntansi Ekuitas SKPD	24

h. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo	24
E. BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
1. Laporan Realisasi Anggaran	28
a. Belanja	28
a.1. Belanja Operasi	28
b.1. Belanja Modal	30
2. Laporan Operasional	32
a. Pendapatan LO	33
b. Beban	33
c. Kegiatan Non Operasional	34
d. Pos Luar Biasa	35
e. Surplus/Defisit LO	35
3. Neraca	35
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	36
b. Persediaan	36
c. Aset Tetap	37
d. Aset Lainnya	40
e. Kontruksi Dalam Pengejaan (KDP)	40
f. Akumulasi Penyusutan	41
g. Ekuitas	44
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	45
a. Ekuitas Awal	45
b. Surplus/Defisit LO	45
c. Dampak Akumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	45
d. Ekuitas Akhir	46
F. BAB VI PENGUNGKAPAN INFORMASI NON KEUANGAN	47
G. BAB VII PENUTUP	50



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

NO	NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	4	PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4 1 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8						
9	4 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10						
11	4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
13						
14	5	BELANJA	15.088.435.164,00	14.023.892.820,00	92,94	13.192.135.567,00
15						
16	5 1	BELANJA OPERASI	13.785.009.253,00	12.722.145.020,00	92,29	11.514.151.967,00
17	5 1 1	Belanja Pegawai	3.962.242.414,00	3.805.499.980,00	96,04	3.525.892.670,00
18	5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	9.822.766.839,00	8.916.645.040,00	90,78	7.988.259.197,00
19	5 1 4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5 1 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5 2	BELANJA MODAL	1.303.425.911,00	1.301.747.800,00	99,87	1.677.983.700,00
22	5 2 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	465.080.111,00	463.402.000,00	99,64	1.010.155.500,00
34	5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	838.345.800,00	838.345.800,00	100,00	687.828.200,00
25	5 2 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
27						
28	5 3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	5 3 1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
30						
31	6	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
32						
33	6 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
34						
35		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.088.435.164,00)	(14.023.892.820,00)	92,94	(13.192.135.567,00)
36						
37	7	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
38						



39	7 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40						
41	7 2	PENGELIARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
42						
43		PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
44						
45		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	(1.064.542.344,00)	0,00	(3.634.997.645,00)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

KEPALA DINASKOMINFO DAN STATISTIK,


JAPRIZAL S.Kom,MA
NIP. 19750120200812 1 008



2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	PENDAPATAN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Surplus dan Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PENDAPATAN LUAR BIASA – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BEBAN	13.671.836.260,00	12.705.036.413,00	966.799.847,00	7,61
23	BEBAN OPERASI				
24	Beban Pegawai	3.805.499.980,00	3.525.892.670,00	279.607.310,00	7,93
25	Beban Barang dan Jasa	8.798.991.830,00	8.106.114.447,00	692.877.383,00	8,55
26	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	800.700.120,00	833.803.751,00	(32.903.131,00)	(3,99)



No	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
33	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	161.767.480,00	143.624.195,00	18.143.285,00	12,63
34	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	104.876.850,00	104.876.850,00	0,00	0,00
35	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(9.075.000,00)	9.075.000,00	(100,00)
38	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13.671.836.260,00)	(12.705.036.413,00)	(966.799.847,00)	7,61
41	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
42	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13.671.836.260,00)	(12.705.036.413,00)	(966.799.847,00)	7,61
	POS LUAR BIASA				
	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.671.836.260,00)	(12.705.036.413,00)	(966.799.847,00)	7,61

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK,

JAPRIZAL, S.Kom, MA

NIP. 19750120 200312 1 008



3. NERACA KOMPARATIF

NERACA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff.	2022	2021
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas Di Kas Daerah		0,00	0,00
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
5	Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
6	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
7	Piutang Pajak		0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang Pajak		0,00	0,00
9	Piutang Pajak Netto (7-8)		0,00	0,00
10	Piutang Retribusi		0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi		0,00	0,00
12	Piutang Retribusi Netto		0,00	0,00
13	Belanja Dibayar Dimuka		0,00	0,00
14	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
15	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
16	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto		0,00	0,00
17	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
18	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto		0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
21	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
22	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Netto		0,00	0,00
23	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
24	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
25	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		0,00	0,00
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
28	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
29	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
30	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
31	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		0,00	0,00
32	Piutang Lainnya		0,00	0,00
33	Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
34	Piutang Lainnya Netto		0,00	0,00
35	Persediaan		833.060,00	1.109.350,00
36	JUMLAH ASET LANCAR		833.060,00	1.035.100,00
37	INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
38	Investasi Non Permanen		0,00	0,00



39	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
40	Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
41	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
42	Dana Bergulir		0,00	0,00
43	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
44	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
45	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
46	Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
48	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
49	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
50	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
51	ASET TETAP		0,00	0,00
52	Tanah	165.404.000,00		135.449.000,00
53	Peralatan dan Mesin	6.578.063.278,00		6.114.661.278,00
54	Gedung dan Bangunan	7.286.891.731,00		5.744.967.731,00
55	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.097.537.005,00		2.097.537.005,00
56	Aset Tetap Lainnya	36.159.500,00		36.159.500,00
57	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00		1.585.374.000,00
58	Akumulasi Penyusutan	(6.429.223.927,00)		(5.300.632.917,00)
59	JUMLAH ASET TETAP	9.734.831.587,00		10.413.565.597,00
60	DANA CADANGAN		0,00	0,00
61	Dana Cadangan		0,00	0,00
62	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
63	ASET LAINNYA		0,00	0,00
64	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
65	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
66	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
67	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
68	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
69	Tuntutan Ganti Rugi Netto		0,00	0,00
70	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
71	Aset Tak Berwujud	69.410.000,00		69.410.000,00
72	Aset Lain-lain	5.302.579.150,00		5.302.579.150,00
73	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.410.000,00)		(69.410.000,00)
74	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.302.579.150,00)		(5.302.579.150,00)
75	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00		0,00
76	JUMLAH ASET	9.735.664.647,00		10.414.674.947,00
78			0,00	0,00
79	KEWAJIBAN		0,00	0,00
80			0,00	0,00
81	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
82	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
83	Utang Bunga		0,00	0,00
84	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
85	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	117.929.500,00
86	Utang Belanja		0,00	651.795.800,00
87	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	
88	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	999.726.300,00
89				



90	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
91	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan		0,00	0,00
92	Utang Dalam Negeri – Obligasi		0,00	0,00
93	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
94	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
95	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
96	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	999.725.300,00
97				
98	EKUITAS DANA		0,00	0,00
99	EKUITAS DANA LANCAR		0,00	0,00
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)		0,00	0,00
101	Pendapatan yang Ditangguhkan		0,00	0,00
102	Cadangan Piutang		0,00	0,00
103	Cadangan Persediaan		0,00	0,00
104	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		0,00	0,00
105	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		0,00	0,00
106	EKUITAS DANA INVESTASI			
107	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
108	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		0,00	0,00
109	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		0,00	0,00
110	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
111	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		0,00	0,00
112	EKUITAS DANA CADANGAN			
113	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0,00	0,00
114	JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA		0,00	0,00
115	JUMLAH EKUITAS		9.735.664.647,00	9.414.949.647,00
116	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		9.735.664.647,00	10.414.674.947,00

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK,


JAPRIZAL S. Kom, MA
NIP. 19750120 200312 1 008



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	9.414.949.647,00	9.551.813.781,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.671.836.260,00)	(12.705.036.413,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	(31.341.580,00)	0,00
7	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.023.892.820,00	0,00
8	EKUITAS AKHIR	9.735.664.647,00	(3.153.222.632,00)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISITK,

JAPRIZAL S. Kom, MA
NIP. 19750120 200812 1 008



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan) ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang "Pengelolaan Keuangan Daerah", serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang "Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah", yang antara lain menyebutkan bahwa "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- 13) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022;
- 24) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 25) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 26) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
- 27) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022.

1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen – komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Laporan Operasional;
- C. Neraca;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yang secara langsung mempengaruhi pengguna laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

6.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 13 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan dirubah dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - a) Sesuai dengan Peraturan Daerah di atas, kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berada dibawah koordinator dari Asisten Bidang Pemerintahan.
 - b) Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan Tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunika, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunika, Informatika, Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - ☞ Perumusan dan penerapan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian,
 - ☞ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika statistik dan persandian,
 - ☞ Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Diskominfotik.



- ☞ Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah,
 - ☞ Pengelolaan barang milik daerah,
 - ☞ Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Diskominfotik, dan
 - ☞ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya
- c) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:
- ☞ Sekretariat,
 - ☞ Bidang Informasi, Komunikasi dan Publik,
 - ☞ Bidang Penyelenggaraan E-Government,
 - ☞ Bidang Statistik dan Persandian dan;
 - ☞ Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Tempat kedudukan/domisili Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas bertempat di Jl.Raja Haji Fisabilillah–Pasir Peti.
- e) Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 3/SPP.821.22/02/2017 tanggal 17 Februari 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh **Japrizal, S.Kom, Ma** selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 166 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

6.2 Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi pendukung dalam menyajikan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 antara lain :

A. Aplikasi SIMDA Keuangan

Aplikasi SIMDA Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun anggaran 2011 sampai dengan sekarang. Aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk penganggaran, penatausahaan akuntansi, pelaporan dan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode anggaran.

Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan selalu melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara update data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung terwujudnya akuntansi berbasis akrual.

B. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dari akhir tahun anggaran 2011 sampai dengan sekarang. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk kebijakan penyusutan dan umur aset tetap, kebijakan akuntansi dan pelaporan aset tetap.



C. Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun anggaran 2019 sampai dengan sekarang. Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.



BAB VII

PENUTUP

Sebagai bagian terakhir dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- ❏ Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas selaku salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD untuk pengelolaan urusan pilihan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
- ❏ Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 yang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.
- ❏ Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran pendapatan.
- ❏ Untuk tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas telah merencanakan untuk melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh enam) sub Kegiatan dengan anggaran belanja langsung yang tersedia teralisasi sebesar Rp 14.023.892.820,00 atau 92,94% dari keseluruhan anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 15.088.435.164,00.
- ❏ Secara umum program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 secara fisik tercapai seluruhnya 100% meskipun target realisasi keuangan tidak tercapai dengan baik dikarenakan refocusing atau deficit anggaran.
- ❏ Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit sebesar minus Rp Rp 1.064.542.344,00 atau mencapai 7,06 % dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp Rp 15.088.435.164,00.
- ❏ Seluruh capaian kinerja sebagaimana yang disimpulkan di atas menunjukkan adanya komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, di samping adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak terkait maupun adanya partisipasi dari segenap lapisan unsur masyarakat.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yakni APBD), sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.



Akhir kata, kiranya Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya di masa mendatang.

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

JAPRIZAL S. Kom, MA
NIP. 19750120 2003 2 1 008